

# **ANALISIS PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh  
**Jolianis, S.Pd, ME**

## **Abstract**

This study aims to identify and analyze: 1) the effect of household consumption, private investment, and development spending revenue to the regional economy, 2) the effect of private investment, construction spending, employment and regional economy on local income. This study is an exploration studies conducted throughout the Kabupaten/Kota is as much as 19 districts / cities in West Sumatra province. Years of the study period was 2005 to 2009 (5 years).

The study found that: 1) household consumption, private investment, and development spending revenue simultaneously or partially significant effect on the regional economy regencies / cities in West Sumatra province. The higher the level of household consumption of a region, the allocation of development spending is high, the amount of private investment that invested in the area and the higher revenues will be able to improve the condition of the local economy. 2) Private investment, construction spending, employment and regional economy simultaneously and partially significant effect on revenue Kabupaten/Kota in West Sumatra province. A growing number of private parties to invest in the area, the size of the allocation of development funds for various public sector facilities, the more labor is absorbed by the sector of the economy will be able to increase local income. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Pengaruh konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah terhadap perekonomian daerah, 2) Pengaruh investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah terhadap pendapatan asli daerah.

*Keywords: Household consumption, private investment, development expenditure, local income*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dan dihitung menggunakan harga yang berlaku. Artinya, PDRB atas dasar harga berlaku merupakan gambaran perekonomian suatu daerah karena semakin tinggi PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah merupakan indikasi semakin baiknya perekonomian daerah yang bersangkutan.

Adapun perkembangan perekonomian provinsi Sumatera Barat yang diukur dari PDRB atas dasar harga berlaku dan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2005 - 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Perkembangan Perekonomian Daerah dan PAD Provinsi Sumatera Barat Periode 2005 - 2009**

No	Tahun	Perekonomian Daerah (Milyar Rp)	Perubahan (%)	PAD (Milyar Rp)	Perubahan (%)
1	2005	43.929,05	-	291,73	-
2	2006	51.385,95	16,97	372,15	27,57
3	2007	58.672,90	14,19	442,13	18,80
4	2008	68.727,97	17,14	529,69	19,80
5	2009	73.824,88	7,42	553,75	4,54

*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2011*

Dari data di atas terlihat bahwa kondisi perekonomian yang diukur berdasarkan PDRB harga berlaku dan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Sumatera Barat secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahunnya namun permasalahannya terlihat bahwa pendapatan asli daerah dan perekonomian daerah persentase peningkatannya mengalami perubahan yang berfluktuasi setiap tahunnya karena idealnya dalam perekonomian diharapkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dan perekonomian daerah secara positif setiap tahunnya, tentunya kejadian ini tidak baik berlangsung lama karena memberikan dampak buruk terhadap pembangunan perekonomian daerah Sumatera Barat dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam menjalani otonomi daerah.

Dari data di atas terlihat penulis menduga bahwa ada keterkaitan antara pendapatan asli dengan perekonomian daerah dan sebaliknya, karena apabila terjadi perubahan dari pendapatan asli daerah menyebabkan terjadinya perubahan pada perekonomian daerah dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian penulis menduga bahwa apabila pendapatan asli daerah mengalami peningkatan akan meningkatkan perekonomian daerah, begitu juga sebaliknya bahwa apabila perekonomian daerah mengalami peningkatan tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penulis menduga terjadinya perubahan yang berfluktuasi dari perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat tentunya disebabkan oleh banyak hal. Faktor yang berkemungkinan dominan mempengaruhi perekonomian daerah Sumatera Barat adalah konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan, dan pendapatan asli daerah. Selanjutnya penulis menduga bahwa faktor yang berkemungkinan dominan mempengaruhi pendapatan asli daerah Sumatera Barat adalah investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah.

Adapun perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan dan tenaga kerja di Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Konsumsi Rumah Tangga, Belanja Pembangunan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat Periode 2005-2009**

N o	Thn	Konsumsi RT ADHB (Milyar Rp)	(%)	Investasi Swasta (Milyar Rp)	(%)	Belanja Pmbngunn (Milyar Rp)	(%)	Tenaga Kerja (Ribu Orang)	(%)
1	2005	22.445,99	-	8.213,51	-	612,19	-	1.542,79	-
2	2006	26.447,60	17,83	9.389,75	14,32	1.279,25	108,96	1.627,64	5,50
3	2007	30.019,01	13,50	14.671,10	56,24	2.028,25	58,54	1.808,91	11,14
4	2008	35.545,80	18,41	16.674,63	13,66	2.281,22	12,47	2.004,67	10,82
5	2009	40.037,77	12,64	14.550,66	12,73	2.369,54	3,87	2.039,63	1,74

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2011

Dari data di atas dapat dilihat bahwa konsumsi rumah tangga secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahunnya namun persentase peningkatannya berfluktuasi setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa relatif kurang stabilnya tingkat pendapatan rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap total konsumsi rumah tangga. Selanjutnya jika dikaitkan antara konsumsi rumah tangga dengan perekonomian daerah terlihat bahwa perubahan pada tingkat konsumsi rumah tangga hampir sebanding dengan perubahan perekonomian daerah. Sebagai bukti bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2009 terlihat bahwa persentase peningkatan dari konsumsi rumah tangga seiring dengan persentase peningkatan dari perekonomian daerah lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Investasi swasta secara kuantitas mengalami peningkatan dari tahun 2006–2008 tetapi persentase perubahannya mengalami perubahan yang berfluktuasi. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan dari jumlah investasi swasta sebesar 12,73%. Terjadinya penurunan investasi swasta ini tentunya sangat tidak diharapkan karena idealnya investasi swasta tersebut harus mengalami peningkatan setiap tahun agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan perekonomian daerah. Jika dilihat hubungan investasi swasta dengan pendapatan asli daerah dan perekonomian daerah, terlihat bahwa penurunan yang terjadi pada tahun 2009 juga menyebabkan terjadi penurunan persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah dan perekonomian daerah.

Belanja pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat pada tahun 2005 – 2009 secara kuantitas mengalami peningkatan namun persentase peningkatannya mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika belanja pembangunan dikaitkan dengan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah maka masalah yang terlihat yaitu pada tahun 2009 terjadi penurunan yang cukup tajam dari belanja pembangunan dan begitu juga dengan pendapatan asli daerah dan perekonomian daerah provinsi Sumatera Barat.

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian di Sumatera Barat secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahun tetapi persentase pertumbuhannya mengalami perubahan yang berfluktuasi. Selanjutnya jika dikaitkan jumlah tenaga kerja dengan pendapatan asli

daerah terlihat bahwa perubahan jumlah tenaga kerja berdampak terhadap pendapatan asli daerah yang dibuktikan bahwa pada tahun 2009 persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan pendapatan asli daerah sama-sama menurun dari tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa terjadinya peningkatan atau penurunan dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian akan mempengaruhi pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Barat karena tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana dari pada pembangunan di daerah tersebut, sehingga dapat memajukan daerah.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh konsumsi rumah tangga, belanja pembangunan dan investasi swasta dan pendapatan asli daerah terhadap perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Seberapa besar pengaruh investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Perekonomian Daerah**

Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:87). Untuk itu diperlukan kajian teoritis yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif yang dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan perekonomian daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Kuncoro, 2004:115).

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, perekonomian daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang diukur atas dasar harga berlaku. Artinya, apabila Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tentunya akan mengindikasikan bahwa terjadinya perbaikan dari kondisi perekonomian suatu daerah.

Dalam ekonomi regional sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuncoro (2004:164) bahwa dari rumusan pendapatan nasional diketahui bahwa peningkatan pendapatan daerah akan memperbaiki kondisi perekonomian yang diukur dari PDRB atas dasar harga berlaku, sehingga peningkatan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian akan dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah.

Saragih (2003:67) menyatakan bahwa bahwa setiap terjadi perubahan kondisi perekonomian akan memberikan dampak berarti terhadap perubahan pendapatan asli daerah (PAD). Daerah yang memiliki perekonomian yang baik akan memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik kondisi perekonomian suatu daerah akan menunjang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perekonomian daerah berpengaruh secara positif terhadap pendapatan asli daerah.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mardiasmo (2002:80) bahwa pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan asli daerah ini merupakan bagian terpenting dari penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah adalah :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Sidik (2002:66) bahwa salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui pendapatan asli daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah yang positif mempunyai kemungkinan memperbaiki kondisi perekonomian menjadi lebih baik.

Selanjutnya Sidik (2002:67) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga akan mencerminkan perkembangan perekonomian daerah.

Tambunan (2006:67) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan memiliki kesempatan yang tinggi untuk membangun perekonomiannya.

### **3. Investasi Swasta**

Investasi menurut Mubyarto (2003:164) adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi ini memiliki 3 (tiga) peran :

- a. Merupakan salah satu pengeluaran agregat, dimana peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional
- b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan ini menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja.
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, sehingga akan memberikan kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal yang terdiri dari mesin, pabrik, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan menurut Froyen (1990) dalam Mubyarto (2003:165) investasi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat bunga, modal tahun sebelumnya, investasi tahun sebelumnya. Dengan kata lain jika tingkat suku bunga naik maka investasi turun dan sebaliknya jika tingkat bunga turun maka investasi naik.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1993) dalam Mankiw (2000:75) investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi, dan mesin-mesin baru lainnya atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan dari investasi. Kekuatan ekonomi utama yang menentukan investasi adalah hasil biaya investasi yang ditentukan oleh kebijakan tingkat bunga dan pajak, serta harapan mengenai masa depan. Tanpa investasi maka tidak akan ada pabrik atau mesin baru, dan dengan demikian tidak ada ekspansi.

Harold dan Dommar dalam Jhingan (1999: 291) memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pembangunan ekonomi khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi swasta adalah dengan mengusahakan keadaan yang kondusif dan menarik bagi berkembangnya industri dalam negeri dan masuknya investasi asing. Dengan dikeluarkannya UU PMA dan PMDN memberikan persyaratan menarik, dan telah membuka kemungkinan bagi pertumbuhan sektor industri dengan landasan yang luas. Sejalan dengan semakin meningkatnya investasi yang berasal swasta baik investasi dengan fasilitas PMDN maupun non fasilitas, diharapkan dapat meningkatkan PDRB dari tahun ke tahun (Mardiasmo, 2002:41).

Menurut Pratiwi (2005:19) investasi yang mempunyai *multiplier effect* berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui kenaikan pendapatan perkapita penduduk. Artinya apabila pendapatan perkapita meningkat, jumlah barang dan jasa yang akan dikonsumsi akan meningkat pula. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka akan meningkatkan peluang lapangan kerja. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran. Berkurangnya pengangguran ini disebabkan oleh terserapnya angkatan kerja dalam proyek-proyek investasi. Keterkaitan di atas tentunya merupakan cerminan dari membaiknya perekonomian.

Jhingan (1999:291) memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam kegiatan perekonomian suatu daerah khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan dan kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal sehingga akan memperbaiki kondisi perekonomian.

Menurut Mubyarto (2003:166) bahwa pendapatan nasional dalam skala regional kita sebut dengan Pendapatan Daerah akan mengalami peningkatan ketika terjadi rangsangan investasi. Demikian pula sebaliknya, pendapatan nasional dan juga PAD akan mengalami kemerosotan ketika investasi turun. Sehingga dengan demikian, kabupaten/kota yang merupakan tujuan investasi para pelaku bisnis memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah PAD-nya dibandingkan dengan kabupaten/kota yang daya tarik investasinya rendah.

Kuncoro (2004:98) menyatakan bahwa semakin banyak pihak swasta yang menginvestasikan modalnya pada suatu daerah tentunya akan dapat memberikan keuntungan bagi daerah yang bersangkutan, karena dengan peningkatan investasi akan meningkatkan penyediaan kesempatan kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### **4. Belanja Pembangunan**

Menurut Kuncoro (2004:90) belanja pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah. Belanja pembangunan di sini meliputi pengadaan dan perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah tentunya akan meningkatkan perekonomian di daerah. Saragih (2003:115) menyatakan bahwa jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong perekonomian daerah menjadi lebih baik.

Menurut Halim (2001:99) bahwa dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja pembangunan yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah agar pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.



Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. (Abimanyu, 2005:40).

## **5. Tenaga Kerja**

Sumber daya manusia yang dilengkapi dengan ketrampilan dan sikap mental terhadap pekerjaan, serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan modal utama bagi terciptanya pembangunan. Tenaga kerja dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena merekalah yang akan melaksanakan pembangunan ekonomi tersebut. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Samuelson dan Nordhaus (2001:54) menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam perekonomian. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Mardiasmo (2002:84) yang menyatakan tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian pada suatu daerah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Apabila sektor perekonomian yang ada pada daerah mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Halim (2001:98) menyatakan bahwa pajak penghasilan yang diperoleh dari tenaga kerja merupakan sumber penerimaan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **6. Konsumsi Rumah Tangga**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri atas semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau afkiran. Pengeluaran ini termasuk pembelian aktiva berwujud yang tidak dapat diproduksi kembali (kecuali tanah) seperti hasil karya seni, barang-barang koleksi dan barang-barang antik. Pengeluaran konsumsi

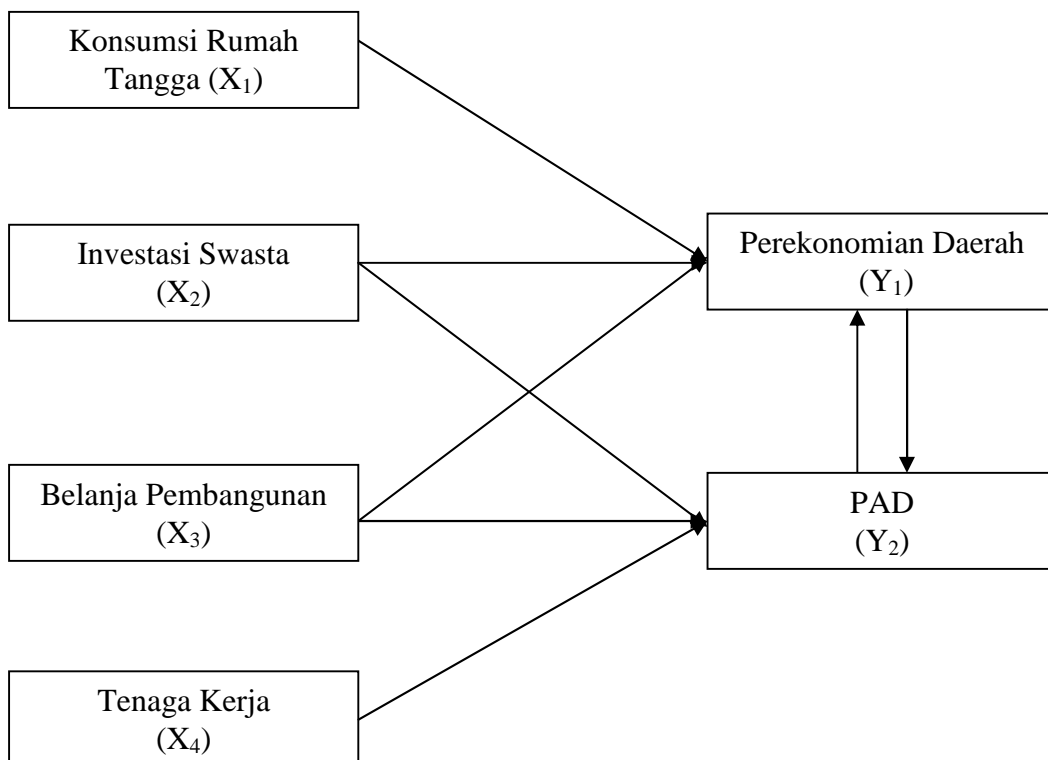
rumah tangga juga termasuk pembelian barang tahan lama seperti mobil, furniture, dan televisi. Imputasi persewaan rumah sendiri juga termasuk di sini. Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga meliputi nilai barang dan jasa yang dihasilkan untuk konsumsi sendiri seperti hasil kebun, peternakan, kayu bakar dan biaya hidup lainnya.

Pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya termasuk di dalam konsumsi rumah tangga. Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening listrik, air, telepon dan lain-lain, merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Konsumsi adalah komponen terbesar dari pendapatan nasional, secara normal mencapai 65% dari GNP. Konsumsi tergantung pada beberapa faktor. Menurut Samuelson (1995:87) fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dan pendapatan siap pakai. Hal ini menunjukkan besarnya konsumsi sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan.

## B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjabaran pengaruh dari masing-masing variabel penelitian ini, maka sebagai kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**

### **C. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini :

1. Konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
2. Investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi eksplorasi yang dilakukan pada seluruh pemerintahan Kabupaten / Kota yaitu sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini akan melakukan analisis potensi dan perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

#### **A. Variabel Penelitian**

##### **1. Perekonomian Daerah ( $Y_1$ )**

Perekonomian daerah yang dimaksud pada penelitian ini keadaan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir yang di ukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa. Variabel perekonomian daerah diukur dalam satuan rupiah (Milyar Rupiah).

##### **2. Pendapatan Asli Daerah ( $Y_2$ )**

Pendapatan asli daerah yang dimaksud pada penelitian ini total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama t tahun terakhir. Variabel potensi daerah ini diukur dalam satuan rupiah (Milyar Rupiah).

##### **3. Konsumsi Rumah Tangga ( $X_1$ )**

Konsumsi rumah tangga yang dimaksud pada penelitian ini adalah besarnya tingkat konsumsi rumah tangga setiap tahun pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Variabel konsumsi rumah tangga pada penelitian ini diukur dalam satuan rupiah (Milyar Rupiah)

##### **4. Investasi Swasta ( $X_2$ )**

Investasi swasta yang dimaksud pada penelitian ini adalah total investasi swasta yang ditanamkan pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang dinyatakan dalam rupiah. Variabel investasi pada penelitian ini diukur dalam satuan rupiah (Milyar Rupiah)

## 5. Belanja Pembangunan ( $X_3$ )

Belanja pembangunan yang dimaksud pada penelitian ini adalah total belanja pembangunan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Besarnya dana belanja pembangunan ini dapat dilihat dari realisasi belanja modal pada Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Variabel Belanja pembangunan pada penelitian ini diukur dalam satuan rupiah (Milyar Rupiah)

## 6. Tenaga Kerja ( $X_4$ )

Tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah angkatan kerja yang bekerja pada sektor perekonomian pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Variabel tenaga kerja pada penelitian ini diukur dalam satuan ribu orang.

## B. Model Analisis

Model analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen digunakan analisis simultan. Analisis simultan pada penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara perekonomian daerah dengan pendapatan asli daerah dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_5 Y_2 + U_{t0}$$

$$Y_2 = \alpha_0 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_6 Y_1 + U_{t0}$$

Dimana :

- $Y_1$  = Perekonomian daerah
- $Y_2$  = Pendapatan asli daerah
- $X_1$  = Konsumsi Rumah Tangga
- $X_2$  = Investasi Swasta
- $X_2$  = Belanja pembangunan
- $X_4$  = Tenaga kerja

Dalam persamaan simultan untuk mengetahui apakah estimasi parameter dapat dilakukan melalui persamaan *reduced form* dari sistem persamaan simultan atau tidak, maka perlu adanya identifikasi. Masalah identifikasi menurut Sumodiningrat (2007:274) dapat dilakukan melalui *order condition* dan *rank condition*. Jadi metode simultan yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah *Ordinary Least Squared* (OLS) atau disingkat karena persamaan simultan tersebut bersifat *exactly identified*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskriptif Variabel Penelitian**

Pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan mendiskripsikan variabel penelitian. Masing-masing variabel penelitian akan dideskripsikan dengan menerangkan nilai rata-rata, nilai terendah dan tertinggi agar dapat memberikan kesimpulan tentang perkembangan konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja, pendapatan asli daerah dan perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2005 - 2009.

1. Rata-rata perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 3.146,35 milyar dengan nilai tertinggi adalah 21.896,37 milyar dan nilai terendah sebesar 468,22 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perbedaan kondisi perekonomian daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang dibuktikan oleh besarnya jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari perekonomian daerah. Selanjutnya jika diperhatikan kondisi perekonomian daerah yang memiliki PDRB tertinggi adalah Kota Padang dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 17.654,53 milyar pertahun dan daerah yang memiliki PDRB terendah adalah Kota Padang Panjang dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 643.64 milyar pertahun.
2. Rata-rata pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat adalah 23,19 milyar pertahun dan pendapatan asli daerah tertinggi adalah 136,22 milyar dan pendapatan asli daerah terendah sebesar 5,16 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lainnya dalam menghimpun pendapatan asli daerahnya. Selanjutnya jika diperhatikan besarnya pendapatan asli daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terlihat bahwa daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tertinggi adalah Kota Padang dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 112.63 milyar pertahun dan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah terendah adalah Kota Pariaman dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 9,45 milyar pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Padang memiliki kemampuan dan potensi yang tinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah selama periode 2005 - 2009.
3. Rata-rata konsumsi rumah tangga Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat adalah 1,629,27 milyar pertahun dan konsumsi rumah tangga tertinggi adalah 13.725, 55 milyar dan konsumsi rumah tangga terendah sebesar 247,30 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat konsumsi rumah tangga yang tinggi setiap tahunnya. Selanjutnya jika diperhatikan besarnya konsumsi rumah tangga masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terlihat bahwa daerah yang memiliki konsumsi rumah tangga tertinggi adalah Kota Padang dengan nilai rata-rata yaitu sebesar

9.932,31 milyar pertahun dan daerah yang memiliki konsumsi rumah tangga terendah adalah Kota Padang Panjang dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 379,90 milyar pertahun.

4. Rata-rata investasi swasta pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat adalah 674,04 milyar dan nilai tertinggi dari investasi swasta adalah 7.271,70 milyar dan nilai investasi swasta terendah adalah sebesar 121,53 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki total investasi swasta yang berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya jika diperhatikan besarnya investasi swasta pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terlihat bahwa daerah yang memiliki total investasi swasta tertinggi adalah Kota Padang dengan nilai rata-rata investasi swasta adalah yaitu sebesar 5.064,31 milyar dan daerah yang memiliki investasi swasta terendah adalah Kota Payakumbuh dengan nilai rata-rata investasi swasta sebesar 154,16 milyar.
5. Rata-rata belanja pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat adalah 90,21 milyar pertahun dan belanja pembangunan tertinggi adalah 205,87 milyar dan belanja pembangunan terendah sebesar 14,72 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sudah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk keperluan belanja pembangunan berupa belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap dan belanja asset lainnya. Selanjutnya jika diperhatikan besarnya belanja pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terlihat bahwa daerah yang memiliki alokasi belanja pembangunan tertinggi adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nilai rata-rata alokasi belanja pembangunan sebesar 127.49 milyar pertahun dan daerah yang memiliki belanja pembangunan terendah adalah Kota Sawahlunto dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 55.92 milyar pertahun.
6. Rata-rata tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat adalah 94,95 ribu orang pertahun dan jumlah tenaga kerja tertinggi yang dapat diserap adalah sebanyak 324,15 ribu orang dan jumlah tenaga kerja terendah yang paling sedikit dapat diserap oleh sektor dalam perekonomian daerah adalah sebesar 14,82 ribu orang pertahun. Selanjutnya jika diperhatikan besarnya tenaga kerja masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terlihat bahwa daerah yang mempunyai kemampuan yang tinggi dan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menyerap tenaga kerja adalah Kota Padang dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 294.93 ribu orang pertahun dan daerah yang mampu menyerap tenaga kerja paling terendah selama lima tahun terakhir adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai rata-rata pertahun yaitu sebesar 19.46 ribu orang pertahun.

## Uji Persyaratan Analisis

### 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil analisis data untuk uji heteroskedastisitas diperoleh bahwa nilai *probability* untuk semua variabel nilainya lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan ( $\alpha=0,05$ ). Jadi dapat dikatakan bahwa data hasil penelitian tidak mengalami kasus heteroskedastisitas.

### 2. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil analisis data untuk uji autokorelasi persamaan 1 diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2,23 dan untuk persamaan 2 diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2,01. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya) sehingga data hasil penelitian dapat dianalisis dengan analisis lebih lanjut untuk keperluan penelitian.

### 3. Uji Kausalitas Granger

Pada penelitian ini penulis akan melakukan uji kausalitas dari perekonomian daerah ( $Y_1$ ) dengan pendapatan asli daerah ( $Y_2$ ). Dari hasil uji Kausalitas Granger didapatkan nilai *probability* dari variabel pendapatan asli daerah ( $Y_2$ ) terhadap perekonomian daerah ( $Y_1$ ) adalah 0,002 yakni lebih kecil dari  $= 0,05$  ( $0,002 < 0,05$ ). Nilai *probability* dari variabel perekonomian daerah ( $Y_1$ ) terhadap pendapatan asli daerah ( $Y_2$ ) adalah 0,01 yakni lebih kecil dari  $= 0,004$  ( $0,004 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil uji kausalitas ini maka dapat dikatakan bahwa variabel perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah mempunyai hubungan dua arah atau saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesama variabel endogen mempunyai hubungan dua arah atau saling mempengaruhi satu sama lainnya sehingga data hasil penelitian dapat dilanjutkan dengan menggunakan persamaan simultan.

## B. Uji Hipotesis

### 1. Hasil Uji Hipotesis Pertama

Dari hasil estimasi pada persamaan perekonomian daerah diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 197.143,2 dengan nilai *probability* 0,00. Jika nilai  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  maka terbukti bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  ( $197.143,2 > 2,70$ ) dan nilai *probability* lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,00 < 0,05$ ). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan, dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Berarti hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%.

Pengujian hipotesis secara parsial diketahui nilai  $t_{hitung}$  dari variabel konsumsi rumah tangga ( $X_1$ ) sebesar 226,98, variabel investasi swasta ( $X_2$ ) sebesar 7,31, variabel belanja pembangunan ( $X_3$ ) sebesar 41,57 dan variabel pendapatan asli daerah ( $Y_2$ ) sebesar 0,068. Jika nilai  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  maka terbukti bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan ( $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ ) lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  (1,98) sedangkan nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel pendapatan asli daerah lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  ( $0,068 < 1,98$ ). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara parsial konsumsi rumah tangga, investasi swasta dan belanja pembangunan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Barat sedangkan pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Hasil Uji Hipotesis Kedua**

Dari hasil estimasi pada pendapatan asli daerah diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 1.268,17 dengan nilai *probability* 0,00. Jika nilai  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  maka terbukti bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  ( $1.268,17 > 2,70$ ) dan nilai *probability* lebih kecil dari alpha ( $0,00 < 0,05$ ). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Berarti hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%.

Pengujian hipotesis secara parsial diketahui nilai  $t_{hitung}$  dari variabel investasi swasta ( $X_2$ ) sebesar 12,52, variabel belanja pembangunan ( $X_3$ ) sebesar 4,36, variabel tenaga kerja ( $X_4$ ) sebesar 10,52 dan variabel perekonomian daerah ( $Y_1$ ) sebesar 26,87. Jika nilai  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  maka terbukti bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk semua variabel dalam persamaan 2 ( $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ , dan  $Y_1$ ) lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  (1,98). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara parsial investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Swasta, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama



berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Apabila secara bersamaan tingkat konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa secara parsial konsumsi rumah tangga mempengaruhi perekonomian daerah secara positif. Artinya semakin tinggi tingkat konsumsi rumah tangga akan meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya meningkatnya konsumsi rumah disebabkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menambah jumlah konsumsinya sehingga barang yang jasa yang dihasilkan dalam perekonomian akan dikonsumsi oleh rumah tangga, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori Keynes dalam Dornbusch (2008:190) yang menyoroti hubungan antara konsumsi dan pendapatan rumah tangga, bila pendapatan masyarakat meningkat maka konsumsi juga meningkat. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa bilamana kecenderungan marginal mengkonsumsi tinggi maka permintaan konsumsi, output dan pekerjaan juga meningkat. Dengan demikian temuan penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan dari konsumsi rumah tangga pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memberikan pengaruh positif dapat meningkatkan perekonomian daerah. Kabupaten/Kota di Provinsi.

Temuan penelitian ini juga membuktikan bahwa secara parsial investasi swasta berpengaruh signifikan dan positif terhadap perekonomian. Apabila investasi swasta pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan secara positif setiap tahunnya maka perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat juga akan mengalami peningkatan.

Temuan penelitian ini relevan dengan pendapat Jhingan (1999:291) yang memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam kegiatan perekonomian suatu daerah khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan dan kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal sehingga akan memperbaiki kondisi perekonomian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa temuan penelitian ini membuktikan bahwa apabila pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera dapat meningkatkan total investasi swasta setiap tahunnya tentu akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Temuan penelitian ini juga membuktikan bahwa secara parsial belanja pembangunan mempengaruhi perekonomian daerah secara signifikan dan positif. Semakin besarnya alokasi belanja pembangunan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat akan dapat memperbaiki infrastruktur yang ada sehingga mendukung terhadap aktivitas perekonomian yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kondisi perekonomian daerah.

Hasil penelitian ini relevan dengan pendapat Saragih (2003:115) yang menyatakan bahwa jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong perekonomian daerah menjadi lebih baik. Dengan demikian dapat diketahui apabila pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan setiap tahunnya tentu akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perbaikan kondisi perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Temuan penelitian ini juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Apabila terjadi peningkatan dari pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tidak dapat meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat habis dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya rutin untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sehingga menyebabkan pendapatan asli daerah tersebut belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap kondisi perekonomian daerah.

Temuan penelitian tidak konsisten dengan pendapat Kuncoro (2004:64) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah akan memperbaiki kondisi perekonomian yang diukur dari PDRB atas dasar harga berlaku, sehingga peningkatan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian akan dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga tidak konsisten dengan pendapat Tambunan (2006:67) yang menyatakan jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan memiliki kesempatan yang tinggi untuk membangun perekonomiannya.

## **2. Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Pembangunan, Tenaga Kerja dan Perekonomian Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Apabila ada peningkatan dari investasi swasta, belanja pembangunan, jumlah tenaga kerja yang diserap dan terjadinya perbaikan dari kondisi perekonomian daerah secara bersamaan tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Temuan penelitian ini juga menemukan bahwa secara parsial investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Apabila jumlah investasi swasta pada daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya maka pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami peningkatan.

Temuan penelitian didukung oleh pendapat Mubyarto (2003:166) yang menyebutkan bahwa pendapatan nasional dalam skala regional kita sebut dengan pendapatan daerah akan mengalami peningkatan ketika terjadi rangsangan investasi. Selanjutnya Kuncoro (2004:98) menyatakan bahwa semakin banyak pihak swasta yang menginvestasikan modalnya pada suatu daerah tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.. Dengan demikian maka diketahui bahwa dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pendapatan asli daerah.

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial belanja pembangunan berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Artinya apabila alokasi belanja pembangunan mengalami peningkatan tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Temuan penelitian ini didukung oleh pendapat Halim (2001:99) yang menyatakan bahwa dalam penciptaan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja pembangunan yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah agar pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pendapat Abimanyu (2005:40) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk

membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya ditemukan bahwa secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan tetapi arah pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah adalah negatif. Artinya apabila tenaga kerja meningkat maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya tenaga kerja pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang bekerja pada sektor informal sehingga peningkatan tenaga kerja belum memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Temuan penelitian ini tidak konsisten dengan pendapat Mardiasmo (2002:84) yang menyatakan tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian pada suatu daerah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Apabila sektor perekonomian yang ada pada daerah mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Juga temuan penelitian ini tidak relevan dengan pendapat Halim (2001:98) menyatakan bahwa pajak penghasilan yang diperoleh dari tenaga kerja merupakan sumber penerimaan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

Penelitian ini juga menemukan bahwa secara parsial perekonomian daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Artinya semakin baik kondisi perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Temuan penelitian ini konsisten dengan pendapat Saragih (2003:67) yang menyatakan bahwa setiap terjadi perubahan kondisi perekonomian akan memberikan dampak berarti terhadap perubahan pendapatan asli daerah (PAD). Daerah yang memiliki perekonomian yang baik akan memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsumsi rumah tangga, investasi swasta, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat suatu daerah, adanya

alokasi belanja pembangunan yang tinggi pada masing-masing daerah, semakin banyaknya investasi swasta yang ditanamkan pada daerah dan semakin tinggi pendapatan asli daerah tentunya akan dapat memperbaiki kondisi perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Namun secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat habis dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya rutin untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sehingga menyebabkan pendapatan asli daerah tersebut belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap kondisi perekonomian daerah

2. Investasi swasta, belanja pembangunan, tenaga kerja dan perekonomian daerah secara simultan maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Semakin banyak pihak swasta yang menginvestasikan modalnya pada daerah, semakin besarnya alokasi dana untuk pembangunan berbagai fasilitas sektor publik, semakin banyak tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

### **Implikasi Kebijakan**

Adapun kebijakan-kebijakan yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih baik maka kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah adalah melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya objek-objek yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah.
2. Upaya selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah :
  - a. Melakukan promosi tentang semua potensi yang dimiliki daerah kepada pihak investor agar pihak dapat meningkatkan jumlah investasi swasta di daerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif pada daerah dengan cara memberikan kemudahan bagi investor dalam mengurus birokrasi izin untuk menanamkan investasi di daerah agar sehingga investasi dan akses pasar akan meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja
  - b. Meningkatkan alokasi belanja pembangunan yang lebih tinggi agar dapat membangun infrastruktur untuk menunjang aktivitas perekonomian serta meningkatkan penyediaan

- sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah
- c. Berupaya semaksimal mungkin untuk peningkatan dari potensi sumber daya manusia agar dapat memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui kebijakan yang mampu meningkatkan motivasi tenaga kerja untuk bekerja pada sektor perekonomian yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota serta mau berpindah dari sektor informal ke sektor formal

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekpi Depkeu
- Adi, Priyo Hari. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali). *Jurnal Studi Pembangunan KRITIS*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. STIE YKPN Yogyakarta
- Dornbusch, Rudiger. 2008. *Makroekonomi*. MGE, Washington.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Macroeconomics. International Edition*. Ninth Edition: Mc Graw Hill.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa Sumarno Zain, Erlangga., Jakarta.
- Guritno Mangkuaubroto, 1993. *Ekonomi Publik*, PBFU UOM, Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. Hal:127-146
- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159
- Idris, 2008. *Model Analisis Data Kuantitatif Dengan Program SPSS*, MM UNP : Padang.
- Ismerdekaningsih, Herlina Endah Sri Rahayu.. 2002. *Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto Di Indonesia ( Studi Tahun 1985-2000)*. ITB Central Library
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*. Vol 49. Hal : 1-21.

- Mankiw, Gregory, N. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Ed.4, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mankiw, Gregory, N. 2003. *Teori Makro Ekonomi*, Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Meyer, H Laurence. 1980. *Macroeconomic ,A Model Building Approach*. South-Western Publishing Co: Chicago.
- Mubyarto. 2003. Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila, *Jurnal Ekonomi Rakyat, Tahun II – No. 4*.
- Nachrowi, D dan Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. FE UI: Jakarta.
- Pratiwi, Fajar. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta Domestik di Provinsi Jawa Barat 1975-2003. *Tesis S2*. Program Pascasarjana UGM.Yogyakarta. (tidak dipublikasikan)
- Pancawati, Neni, 2000, Pengaruh Rasio Kapital Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Stok Kapital dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan GDP di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 15, No. 2
- Ratnawati, Nirdukita dan Rulli Rizki. 2007. *Analisis pengaruh variabel indikator ekonomi makro terhadap perekonomian Indonesia: pendekatan pasar barang dan pasar uang (jurnal) periode 1990.1-2005.4*. Jurnal Ekonomi Indonesia No. 2 Desember 2007.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Jogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Ekonometrika Pengantar*. BPFE: Yokyakarta.
- Supriady, Dedy. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Todaro, Michael. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan
- Ulum, Ihyaul. 2010. Analisis Hubungan Peringkat Daya Tarik Investasi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Indonesia. (*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik (JAKSP)*, Volume 7 No. 1, Pebruari 2006. ISSN: 1411 –5921)
- Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. Hal : 413 – 423
- Zaris, Roeslan. 1987. *Prespektif Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta LPFE UI.